

Judul : Panitia Angket KPK Terbentuk: Dulu Tolak, Kini Dukung
Tanggal : Kamis, 08 Juni 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► PANITIA ANGKET KPK TERBENTUK

Dulu Tolak, Kini Dukung

JAKARTA — DPR memutuskan untuk menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah partai politik yang awalnya bersikap keras tak mengirimkan wakilnya ke Panitia Angket, kini berbalik arah.

Anggara Fernando & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Tujuh parpol sudah mengajukan nama-nama ke Panitia Angket. Nama yang terdaftar yakni Masinton Pasaribu dan Riska Mariska (Fraksi PDI Perjuangan), Bambang Susatyo, Agun Gunanjar S, Adies Kadir, M. Misbakhun, dan John Kennedy Azis (Golkar), Wenny Warouw (Gerindra), Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais (Partai Amanat Nasional), Arsul Sani serta Anas Thahir (Partai Persatuan Pembangunan), Ahmad Sahroni (Nasional Demokrat), dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura).

Melihat komposisi parpol yang sudah mengirim wakilnya ke Panitia Angket, tinggal tersisa tiga partai yang belum bersikap yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemberitaan *Bisnis*, Jumat (12/5) menyebut ada tujuh parpol yang tegas menolak hak

angket seperti PKS, Gerindra, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan Golkar. Gerindra yang semula bersikap lantang kini sebaliknya.

Rapat pembentukan Panitia Angket berlangsung tertutup di lantai III Gedung Nusantara III yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dalam rapat itu memutuskan Agun Gunandjar Sudarsa dari Partai Golkar sebagai Ketua Panitia Angket.

"Panitia Angket selanjutnya menggelar rapat pertama untuk memberitahukan kepada publik karena aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam Panitia Angket ini menjadi pedoman," kata Agun di Jakarta, Rabu (7/6).

Pihaknya memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan laporan kinerja mereka kepada rapat paripurna DPR RI.

Dia juga mengingatkan para panitia Angket untuk melaksanakan tugas sesuai tata tertib DPR yang tertuang dalam ketentuan pasal 169 sampai dengan 177. Sebelumnya, Fraksi PKS telah menyampaikan sikap resmi pada forum sidang paripurna bahwa mereka menolak hak angket serta tak mengirim wakil ke pansus. Fraksi Demokrat juga melakukan hal yang sama.

Munculnya Panitia Angket terhadap KPK bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada

KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Agun sudah diperiksa KPK dan dihadirkan dalam persidangan kasus KTP-El di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Agun merupakan salah satu anggota DPR yang disebut menerima *fee* dari proyek pengadaan KTP-El. Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Komisi II dan Banggar DPR saat itu menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP-El.

SIKAP PRESIDEN

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengharapkan Presiden Joko Widodo mengambil sikap yang tegas terkait pembentukan Panitia Angket terhadap KPK oleh DPR.

Presiden Jokowi tidak perlu ikut-ikutan 'mengecek' KPK dan harus memberi pernyataan tegas untuk mendukung komisi antirasuah itu.

"KPK tidak boleh diganggu, KPK tidak boleh dilemahkan. Itu saja cukup dari Presiden, tapi sekarang ini pernyataan Presiden tidak *clear*, tidak tegas," kata Oce.

Dia mengharapkan sejumlah fraksi yang menyatakan menolak mengirimkan Panitia Angket dapat konsisten dengan sikapnya. Sesuai aturan hukum, panitia akan cacat prosedural jika ada fraksi yang tidak mengirimkan perwakilan.

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengatakan DPR tidak membicarakan kasus per kasus. Pihaknya, lebih menyoroti tentang tata kelola lembaga antirasuah itu.